

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka itu, pemerintah telah berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah, dan bertahap serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik ekonomi, IPTEK, sosial maupun budaya. Hal ini dilakukan agar Sumber Daya Manusia Indonesia mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari Negara lain (Anonim, 2004: 7).

Dengan ditetapkannya otonomi daerah melalui ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, diiringi dengan lahirnya UU Nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah banyak membawa kemajuan inovatif di bidang pengelolaan pendidikan. Konsep dan prinsip otonomi pendidikan adalah memberikan ruang kreatifitas dan inovasi yang proporsional sebagai upaya memberdayakan pendidikan.

Pemerintah bertindak sebagai pelayan kebutuhan sekolah, bukan sebagai pihak yang mengintimidasi sekolah. Kemudian lembaga sekolah sebagai pelayan belajar dan pelaksana pembelajaran. Otonomi pendidikan juga mengatur standar kualitas oleh pemerintah yang dipersyaratkan dan melakukan akreditasi untuk mengukur kualitas semua jenis dan jenjang

pendidikan. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global, menurut Mulyana (2003: 4) langkah pertama yang dilakukan adalah menata SDM (Sumber Daya Manusia), dari segi aspek intelektualitas, emosional, spiritual, kreativitas, moral, maupun pertanggung jawabannya. Dalam tata dunia yang telah disebutkan di atas, maka peran dunia pendidikan dianggap terpenting sebab dengan pendidikanlah keberadaan ilmu pengetahuan itu bias dikuasai.

Kualitas pendidikan merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan yang hakiki untuk mencapai tujuan pendidikan. Soebagyo, (2002 : 29), menyatakan, apabila kita perhatikan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam arti tersedianya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas mampu mempertahankan dan mengembangkan manusia Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia. Tanpa pendidikan yang berbobot dan berkualitas, upaya mencerdaskan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia seutuhnya sulit mencapai sasaran. Kualitas pendidikan juga sangat menentukan dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal. Kualitas pendidikan dapat dicapai dengan menciptakan iklim sejuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar siswa, serta mampu memberdayakan kemampuan peserta didik.

Namun demikian, sistem pendidikan nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional global dewasa ini. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, dan penanganan masalah bukan oleh ahlinya, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jejang pendidikan belum dapat terwujud.

Muchlas Samani menyatakan, hasil belajar ditentukan antara lain oleh gabungan antara kemampuan dasar siswa dan kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan ditentukan oleh motivasi yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat penting menumbuhkan motivasi belajar siswa Soebagyo (2002: 145). Proses pendidikan secara umum diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari persoalan hidup yang melingkupinya. Sehubungan dengan hal itu, guru dituntut untuk dapat mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk

penindasan dan ketertindasan yang dialami oleh masyarakat, baik dari kebodohan maupun ketertinggalan. Pembelajaran saat ini masih banyak diwarnai oleh penyampaian arus informasi dari guru ke siswa secara sepihak, yang akhirnya siswa terbebani banyak konsep informasi yang bersifat vertikal, tanpa diberikan keleluasaan untuk berkreasi dan mengekspresikan kemampuan berfikir secara mandiri. Hal ini terjadi akibat keterbatasan kompetensi yang dimiliki dan lemahnya kinerja pendidik, sehingga sulit mengembangkan diri.

Masih berkaitan dengan masalah peningkatan kinerja guru di sekolah, faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah motivasi, keterbukaan manajemen kepala sekolah, dan pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang ideal dan sesuai dengan langkah kerja yang benar. Suharsimi Arikunto (2004 : 23), kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada personil sekolah pada umumnya dan khususnya guru, agar kualitas pembelajarannya meningkat.

Sebagai dampak dari meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkat pula kualitas lulusan sekolah itu. . Suharsimi Arikunto menyatakan, Supervisi diartikan sebagai “melihat dari atas”. Dengan pengertian tersebut maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru

Suharsimi Arikunto (2004: 4). Dengan demikian, supervisi diartikan sebagai penilaian atasan kepada bawahan dengan kriteria benar salah, menakutkan dan berakhir dengan pemberian sanksi. Pada saat ini supervisi lebih ditekankan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan orang yang disupervisi.

Paradigma lama yang menempatkan supervisi sebagai pengawas yang bertugas melakukan pembinaan sekolah sudah seharusnya digeser menuju fungsi problem solver dan inovatif yang lebih mengedepankan pengembangan peningkatan proses belajar mengajar. Sebagaimana pernyataan Suharsimi Arikunto (2004 : 23), kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada personil sekolah pada umumnya dan khususnya guru, agar kualitas pembelajarannya meningkat. Sebagai dampak dari meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkat pula kualitas lulusan sekolah itu.

Bercermin pada kondisi di atas, untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan satu kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah meletakkan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Untuk merealisasikan undang-undang tersebut, perlu dilakukan manajemen yang tepat dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional), yang menuntut penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang sebelumnya merupakan wewenang pusat. Dengan berlakunya otonomi daerah ini, kewenangan bergeser pada sekolah di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah kota dan kabupaten.

Dengan otonomi daerah diharapkan strategi pembangunan pendidikan yang tidak efektif di masa lalu ditinggalkan dan diubah dengan strategi pembangunan pendidikan yang efektif. Strategi tersebut adalah strategi pembangunan pendidikan yang memberdayakan, yang memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan wawasan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Peran pemerintah ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Peran ini dapat dilakukan oleh semua jenjang pemerintahan baik pusat, propinsi maupun kabupaten atau kota, yang menjadi fokus pembangunan pendidikan adalah sekolah.

Strategi dengan fokus sekolah ini atau yang lebih dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) disingkat MBS. Nurkolis (2003:1) MBS adalah penggunaan sumber daya yang berazaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau Pembelajaran.

Sehingga dengan MBS diharapkan akan melahirkan masyarakat belajar. Karena dengan strategi ini maka seluruh jajaran pengelola dan pelaksana pendidikan dituntut untuk belajar.

Selama ini akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah. Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dan manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat sekitar. Kedudukan masyarakat dan orang tua murid sebagai konsumen pendidikan dengan segala kepentingannya telah lama diabaikan. Situasi ini harus segera diubah sekolah dan guru sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan orang tua untuk mendidik putra putrinya, maka seyogyanya sekolah dan guru menunjukkan akuntabilitasnya kepada mereka.

Dengan otonomi maka hambatan tersebut berusaha dihilangkan. Dalam wacana ini maka sekolah menjadi fokus dalam pengelolaan pendidikan. Konsekwensinya kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam meningkatkan keberhasilan lembaga yang dipimpinnya.

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memikul tanggung jawab yang amat besar untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan mengemban tugas pokok mencapai tujuan pokok pendidikan nasional yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, maka kepala sekolah dituntut untuk mampu mengarahkan, mengatur,

memberi teladan kepada anak buahnya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan sekolah mencapai tujuan ditentukan oleh berhasil tidaknya kepala sekolah mengatur atau mengelola sekolah atau seluruh potensi sekolah agar berfungsi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Keefektifan (keberhasilan) sekolah juga akan terletak pada bagaimana dengan kepemimpinan kepala sekolah itu dalam merancang-bangun organisasi sekolah (Nurkolis: 2002). Fakta umum telah menunjukkan bahwa, dalam mengelola sekolah diperlukan suatu rencana yang terinci, sehingga tidak terjadi pelaksanaan yang tumpang tindih, kurang koordinasi, komunikasi yang kurang interaktif, kurang motivasi, tidak transparan, kurang teliti, dan kurang dipahami didasarkan atas tugas dan fungsi organisasi. Kurang terprogramnya perencanaan sekolah, menjadikan prestasi kerja yang dicapai oleh sekolah tidak maksimal (Anonim, 2004: 1).

Mulyasa (2006) dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Kepala Sekolah Profesional” menyerupakan tugas kepala sekolah bagi pimpinan angkatan bersenjata. Jika dalam angkatan bersenjata ada istilah “ tidak ada prajurit yang bersalah”, maka dalam pendidikan pun “ tidak ada tenaga kependidikan yang bersalah”. Selama ini justru sering kali disalahkan adalah guru padahal sebagian besar kesalahan dan dosa adalah kesalahan dan dosa

kepala sekolah. Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah ini juga didukung oleh pendapat Purwanto, 1998: 101) yang menyatakan sebagai berikut.

Di antara pemimpin-pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan tingkatannya , kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting . Dikatakan sangat penting karena lebih dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan tiap-tiap sekolah. Dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu program pendidikan dan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan itu, sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan.

Tugas dan peranan kepala sekolah sangat banyak dan kompleks. Kepala sekolah tidak hanya bertugas memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah saja, tetapi seorang kepala sekolah juga diharuskan mampu mengkoordinasikan fungsi-fungsi pelaporan, manajemen administrasi, manajemen keuangan, membuat skala prioritas, serta membuat berbagai keputusan yang mendukung percepatan tercapainya tujuan sekolah.

Tanggung jawab kepala sekolah tidak hanya terbatas pada tugas internal sekolah saja tetapi juga tugas di luar sekolah yang berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat dan pihak orang tua murid. Untuk menghadapi berbagai pihak dengan berbagai sifat yang berbeda, maka kepala sekolah perlu memiliki kesadaran tentang adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kelompok yang dihadapi. Kepala sekolah harus mampu menjadi mediator antara sekolah dengan masyarakat, dengan menyediakan waktu untuk semua pihak agar bisa berdialog dan membuat

kesepakatan dan konsensus yang merefleksikan harapan-harapan masyarakat dan kepala sekolah dan pihak terhadap sekolah itu sendiri .

Untuk melaksanakan tugas yang banyak dan beragam tersebut, diperlukan seorang kepala sekolah yang profesional. Satu hal yang perlu disadari bahwa menjadi kepala sekolah yang profesional adalah sesuatu yang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipahami, dipelajari, dan dikuasai. Untuk itulah diperlukan keahlian kepemimpinan. Karena kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan mampu melaksanakan tugas kekepalasekolahan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang telah digariskan. Sebaliknya kepemimpinan yang tidak efektif akan sulit mencapai suatu keberhasilan.

Mengingat peran sentral kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah, maka akan sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah. Untuk itulah penulis bermaksud mengadakan penelitian yang terungkap dalam tesis yang berjudul “Peningkatan Kualitas Kerja Kepala Sekolah (Studi Situs MTs Al-Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, fokus dalam penelitian ini, “Bagaimana upaya kepala sekolah meningkatkan kualitas kerja. Fokus tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sub fokus.

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam peningkatan kualitas kerja di MTs Al-Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu.
2. Bagaimana upaya peningkatan kualitas kerja kepala sekolah di MTs Al-Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu dari karakteristik kepemimpinan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, ada 3 tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi dan misi MTs Al-Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu yang efektif.
2. Kepemimpinan kepala sekolah MTs Al-Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas kajian bagi kepala sekolah dalam memimpin sekolah agar lebih optimal sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah pada Madrasah Tsanawiyah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi para Kepala Sekolah, guru sebagai pembimbing, dan pihak terkait, khususnya dilingkungan dunia pendidikan dan dalam rangka pengembangan terhadap ilmu kepemimpinan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan.

E. Daftar Istilah

1. Kualitas

Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

2. Kerja

Suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.

3. Kepala Sekolah

Seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi intraksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.